

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA (Studi pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo)

Mohammad Iqbal Syahriar, Bambang Kusbandrijo, Supri Hartono  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

[Iqbalsyahriar068@gmail.com](mailto:Iqbalsyahriar068@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas  
Pendidikan Ganesha.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan di kota Surabaya, dengan fokus pada studi kasus UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan melalui program-program pembinaan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh UPTD Kampung Anak Negeri. Penelitian ini menyarankan peningkatan

koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak jalanan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, UPTD Kampung Anak Negeri, Anak Jalanan

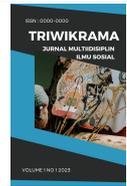
### ABSTRACT

*This research aims to analyze the implementation of policies for protecting street children in the city of Surabaya, with a focus on the case study of the UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. This research uses a qualitative descriptive method to evaluate the effectiveness of policies and the factors that influence the success of their implementation. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of the policy for protecting street children still faces various challenges, including limited human resources and community support. However, there are several success factors in improving the welfare of street children through coaching and empowerment programs implemented by the UPTD Kampung Anak Negeri. This research suggests improving coordination between institutions and increasing human resource capacity to optimize the implementation of policies for protecting street children.*

**Keywords:** Policy Implementation, State Children's Village UPTD, Street Children

### PENDAHULUAN

Kota Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, menghadapi berbagai tantangan sosial yang kompleks, salah satunya adalah permasalahan anak jalanan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2023 mencapai 2.893.698 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, masalah sosial seperti anak jalanan semakin mendesak untuk diatasi.



Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan anak terlantar dan orang miskin. Namun, implementasi kebijakan kesejahteraan anak jalanan di Kota Surabaya masih belum optimal. Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk meminimalisir dan mengatasi masalah anak jalanan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Kota Surabaya yang memiliki tugas untuk menangani anak-anak penyandang masalah sosial. UPTD ini memberikan pelayanan dan pembinaan secara berkala kepada anak jalanan. Beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena anak jalanan antara lain kemiskinan, ukuran keluarga besar, kurangnya kesempatan kerja produktif, dan fasilitas kesejahteraan sosial yang tidak memadai.

Anak jalanan di Kota Surabaya seringkali diabaikan dan dianggap sebagai bagian dari kelompok yang anarkis dan tidak memiliki aturan. Keberadaan mereka di jalanan seringkali disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang miskin, memaksa mereka untuk bekerja sebagai pengamen, pedagang asongan, atau pemulung. Hal ini mengakibatkan mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan bahaya di jalanan.

Data dari Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan pada tahun 2023 masih tinggi. Upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya melalui Dinas Sosial, bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada anak jalanan agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan tidak kembali ke jalanan. Pembinaan ini diharapkan dapat membantu mereka membuka usaha sendiri dengan dukungan modal dari pemerintah.

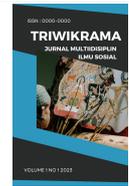
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dalam menangani masalah anak jalanan. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kebijakan ini diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak jalanan di Surabaya, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan anak jalanan di Kota Surabaya dan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Sehubungan dengan kebijakan, Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014:8) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)".

### **Implementasi Kebijakan**



Implementasi Kebijakan merupakan tahapan penting dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan public, Implementasi Kebijakan merupakan tahapan kedua dalam proses suatu kebijakan public setelah formulasi kebijakan disepakati, kemudian dilakukan implementasi. Secara sederhana proses implementasi sering diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintah sebagai hasil dari pada formulasi kebijakan. Karena tanpa dilakukannya implementasi suatu kebijakan hanya sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat berbagai para ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian dari implementasi. Grindle (1980) menyatakan, implementasi adalah proses umum dalam tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle juga menambahkan bahwa proses implementasi baru akan terlaksana apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan.

### **Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Van Meter dan Van Horn (1992) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau secara kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Erwan & Dyath, 2018). Sedangkan menurut teori Implementasi George Edward III (1980) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik dan apa yang menjadi tujuan kebijakan public tidak akan tercapai (Turhindayani, 2005). Sesuai dengan pengertian Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan, yakni :

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
- 2) Sumber Daya
- 3) Hubungan Antar Organisasi
- 4) Karakteristik Pelaksana
- 5) Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

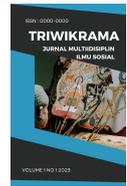
### **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki arti mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, realita, masalah, serta peristiwa yang hanya dapat dipahami jika peneliti menelurusinya dengan mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Pengertian yang mendalam tidak akan mungkin tanpa observasi, wawancara, dan pengalaman langsung. Itu berarti bahwa terdapat hubungan yang logis antara pemahaman art, wawancara, observasi, teori fenomenologi dan proses induktif. Dengan demikian metodologi dan metode sangat sulit dipisahkan dalam konteks penelitian kualitatif (Semiawan, 2010).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Indikator Pertama yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Indikator ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri. Kedua Elemen ini sangat berfungsi untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan, memberikan panduan yang jelas bagi para pelaksana kebijakan, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan tujuan akhir yang diinginkan. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan melibatkan pemantauan terus menerus dan penyesuaian berdasarkan umpan



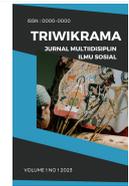
balik yang diterima selama pelaksanaan, untuk memastikan bahwa kebijakan tetap efektif dan relevan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Faktor Ekonomi atau Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya anak jalanan. Anak-anak yang memiliki keterpurukan serta kesulitan dalam kondisi ekonomi, baik secara individu maupun keluarga akan berusaha semampu mungkin mencari penghidupan di jalanan. Hal ini dilakukan karena keadaan struktural, yaitu kesempatan untuk memperoleh pekerjaan bagi mereka yang terbatas. Selain itu, terjadi ketimpangan sosial dan biaya hidup yang semakin mahal dan terpaksa harus beradaptasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan untuk anak yang tereksplotasi secara ekonomi cenderung memiliki dampak yang buruk bagi anak. Terlebih, anak-anak dianggap sebagai tenaga amatir yang belum memiliki spesialisasi kemampuan tertentu dan cenderung diupah rendah pada sektor pekerja informal. Bahkan, sering anak yang tereksplotasi ini ditempatkan dan dipekerjakan di pekerjaan yang rawan akan tindakan yang berbahaya bagi mereka, seperti pemerasan, mengemis, mengamen. Kemudian, terdapat pula potensi bahwa anak berada pada kondisi hubungan kerja yang bersifat merugikan, eksploratif, serta memaksakan untuk bekerja dalam sektor yang sangat tidak dapat di toleransi. Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo serta seluruh Pegawai Semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas UPTD Kampung Anak Negeri yang tertera pada Perwali Surabaya Nomor 61 Tahun 2012 mengenai penanganan anak jalanan di Kota Surabaya dengan memberikan pelayanan serta pembinaan untuk anak – anak jalanan, anak terlantar dan anak yang tereksplotasi. Para pegawai UPTD Kampung Anak Negeri sendiri pun juga paham dengan tujuan dari kebijakan tersebut, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan sesuatu pelayanan dan pembinaan yang terbaik untuk anak – anak jalanan, anak terlantar dan anak yang tereksplotasi.

### **Sumber Daya**

Dalam Implementasi kebijakan, Sumber daya merujuk pada elemen-elemen esensial yang mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang mencakup aspek finansial, personel, teknologi, informasi, yang semuanya dikelola secara efektif untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Peningkatan mutu pendidikan juga diterapkan dengan mewajibkan bagi warga negara untuk memiliki ilmu pendidikan selama 12 tahun dan disertai dengan pembentukan kurikulum yang dapat membentuk pendidikan karakter berdasarkan pendidikan kewarganegaraan yang telah diatur dalam undang-undang. UPTD Kampung Anak Negeri merupakan satu dari sekian solusi pemerintahan dalam menangani permasalahan sosial seperti anak jalanan. Banyak anak-anak jalanan yang memulai turun di jalanan dikarenakan faktor perekonomian keluarganya yang rendah serta tidak luput dari pendidikannya juga rendah sehingga mereka mudah untuk dieksplotasi agar dapat menstabilkan perekonomian keluarga meskipun juga upah yang mereka dapat tidak sesuai ekspetasinya dan sangat berbahaya bagi anak-anak karena di usia anak-anak mereka belum mempunyai skill untuk bekerja. Maka dari itu UPTD Kampung Anak Negeri ini menjadi tujuan akhir bagi anak-anak jalanan karena di Kampung Anak Negeri ini anak-anak jalanan mendapatkan apa yang belum mereka dapat selama menjadi anak jalanan, disini mereka diberikan pendidikan 12 tahun dan tentunya hak perlindungan anak juga mereka dapatkan.

UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo yang melaksanakan kebijakan penanganan anak jalanan dan melakukan pembinaan terhadap anak jalanan tentunya sangat membutuhkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Di dalam Kampung Anak Negeri ini ada beberapa pegawai kurang lebih 1 sampai 3 Orang yang berstatus sebagai Pembina Anak-anak jalanan sedangkan jumlah anak jalanan sendiri 35 anak.



Mengenai Sumber daya manusia Kampung Anak Negeri khusus pembina anak-anak bisa dikatakan kurang dikarenakan jumlah anak jalanan yang melebihi kapasitas jumlah Pembina. Melalui wawancara dengan salah satu pembina, jika jumlah pembina bisa ditambah 3 atau 4 orang pasti akan terbantu dalam melakukan pembinaan dengan sebaik mungkin.

### **Hubungan Antar Organisasi**

Hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada kompleksitas interaksi dan ketergantungan antara berbagai entitas organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Hubungan antar organisasi menjadi kunci dalam memahami bagaimana kebijakan public dijalankan, karena berbagai organisasi ini tidak hanya berinteraksi secara vertical dengan pemerintah, tetapi juga secara horizontal dengan organisasi lainnya, termasuk lembaga pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, sector dan swasta. Kepala UPTD Kampung Anak Negeri telah menjelaskan bahwa, dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah serta menjalin kerja sama dengan stakeholder ini sudah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam penanganan anak jalanan khususnya di Kota Surabaya. UPTD Kampung Anak Negeri ini tidak bisa berjalan sendiri, melainkan kita harus melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk konsultasi mengenai kesehatan pada anak-anak jalanan yang berada di Kampung Anak Negeri, Dinas Pendidikan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak jalanan. Stakeholder selanjutnya yaitu Satpol PP dan Kecamatan, untuk satpol pp ini bertugas merazia untuk anak-anak jalanan sedangkan Kecamatan ini bertugas menerima laporan dari warga setempat bahwa ada warganya yang dieksploitasi oleh keluarganya sendiri, untuk anak-anak yang terjaring oleh satpol pp akan dibawa ke UPTD Liponsos Keputih untuk melakukan pendataan setelah melakukan pendataan anak-anak akan diserahkan kembali ke keluarga atau akan diserahkan di Kampung Anak Negeri untuk melaksanakan pembinaan dan untuk koordinasi dengan para stakeholder sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan.

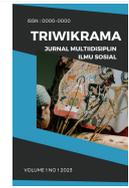
### **Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan merujuk pada berbagai sifat dan ciri khas yang dimiliki oleh individu-individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik. Faktor-faktor yang termasuk dalam karakteristik ini mencakup tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaksana tentang kebijakan yang diterapkan, kompetensi teknis dan profesional yang mereka miliki, serta komitmen dari motivasi mereka untuk menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu, sikap dan persepsi para pelaksana terhadap kebijakan juga memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan sukses. Proses Implementasi mencakup berbagai langkah, mulai dari penyusunan peraturan dan pedoman pelaksanaan, pengalokasian sumber daya, pelatihan personel yang terlibat, hingga pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Kasubag TU UPTD Kampung Anak Negeri melalui wawancara menjelaskan, Program Kampung Anak Negeri sudah banyak yang berjalan contohnya menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan supaya anak-anak jalanan bisa melanjutkan pendidikan hingga mendapatkan relasi untuk bekerja. Dan juga menjalin kerjasama dengan LSM untuk mengembangkan keterampilan serta minat belajar di luar lingkungan sekolah.

### **Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi**

Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn mengacu pada konteks luas dimana kebijakan tersebut diterapkan, yang mencakup berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Lingkungan Sosial mencakup nilai-



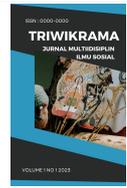
nilai, norma, dan dinamika masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Lingkungan Politik mencakup pada struktur kekuasaan, stabilitas politik, dan dukungan atau oposisi dari aktor-aktor politisi termasuk legislatif, eksekutif dan partai politik. Lingkungan Ekonomi mencakup kondisi ekonomi secara umum, seperti tingkat pendapatan, inflasi dan sumber daya yang tersedia, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Staff dan Pembina melalui wawancara menjelaskan bahwa eksploitasi anak memiliki dampak yang sangat berbahaya dan merusak fisik, mental dan emosional anak-anak yang menjadi korban. Secara fisik, anak-anak yang dieksploitasi seringkali menghadapi kondisi kerja yang berbahaya, kekurangan gizi dan kurangnya akses perawatan kesehatan. Secara mental, anak-anak ini mengalami trauma yang dapat mengakibatkan gangguan kecemasan, depresi dan masalah kesehatan mental lainnya yang bertahan hingga dewasa. Secara emosional, eksploitasi merampas masa kecil mereka, menghalangi perkembangan emosional yang sehat, dan seringkali menyebabkan perasaan rendah diri dan kehilangan harapan. Selain itu, eksploitasi anak dapat mengganggu pendidikan, yang membatasi peluang masa depan mereka untuk keluar dari siklus kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, Kehilangan akses pendidikan juga mengurangi kemampuan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif di masa depan.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Surabaya dengan fokus pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak jalanan. Program-program pembinaan dan pemberdayaan yang dijalankan oleh UPTD Kampung Anak Negeri telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan anak-anak jalanan, meskipun masih perlu adanya peningkatan dalam hal koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun beberapa poin kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Jumlah sumber daya manusia di UPTD Kampung Anak Negeri masih belum mencukupi untuk menangani jumlah anak jalanan yang ada. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya pembinaan dan pelayanan yang diberikan.
2. Dukungan Masyarakat: Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program-program perlindungan anak jalanan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini.
3. Keberhasilan Program Pembinaan: Program-program yang telah dilaksanakan, seperti pelatihan keterampilan dan pendidikan, memberikan dampak positif bagi anak-anak jalanan, membantu mereka untuk hidup lebih mandiri dan tidak kembali ke jalanan.
4. Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang lebih baik antara UPTD Kampung Anak Negeri dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan LSM, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
5. Perlunya Peningkatan Kapasitas: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kualitas, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Surabaya. Secara keseluruhan,



Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan dalam koordinasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Diharapkan, temuan-temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

#### Daftar Pustaka

- Afifudin, M. (2014). *Pembinaan Anak Jalanan Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya*. 19.
- Andi Aysha Zalika Ardita Putri. (2022). Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya). *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1), 28–37. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v>
- Arpin, A., Agustang, A., & Muhammad Idkhan, A. (2022). Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2745>
- Fetriani, F., Zulyan, Z., Hasibuan, M., Saputra, E., & Qurniati, A. (2022). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Jalanan. *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 68–71. <https://doi.org/10.53363/bw.v2i1.69>
- Hayati, K. R., Febriana, L., Puspita, N. C., & Agustin, V. (2023). Memberdayakan Anak Jalanan Melalui Pendidikan: Pendirian Kampung Anak Negeri di Kelurahan Wonorejo Kec. Rungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8045648>
- Laksa, S. K. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPTD Liponsos Keputih. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2(Juli), 91–98.
- Mahardi, O. K. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Pustus Sekolah (Studi Kasus di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi kebijakan*. 19–42.
- PRATAMA, S., & SUPRAYOGA, S. (2022). Implementasi Pembinaan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah Di Kota Surabaya (Studi Kasus Di Uptd Kampung Anak Negeri). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(2), 114–130. <https://doi.org/10.38156/jisp.v2i2.146>
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.